

## IKHTISAR

### Cecep Betaris, *Tinjauan terhadap Pemikiran Politik Ibn Taimiyah dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.*

Doktrin politik utama Ibn Taimiyah adalah pandangan bahwa kemaslahatan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat dapat diwujudkan hanya apabila ajaran-ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah (Syariah, Hukum Islam) dipahami dan diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan negara. Kemaslahatan sendiri bertingkat-tingkat, antara lain yang bersifat *dlaruriy*, seperti memelihara agama (*hifdzu al-din*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), akal (*al-'aql*), kehormatan/keturunan (*al-nasl*), dan masyarakat (*al-'ummah*), sebaga tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik Ibn Taimiyah mengenai tujuan dan tugas negara, landasan pemikiran politiknya, dan relevansinya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadits, yang selanjutnya dilakukan ijtihad oleh fuqaha'. Ijtihad sendiri dilakukan dengan menerapkan metode penggalian hukum (*thuruq al-istinbath al-ahkam*), kaidah-kaidah ushul (*al-qawa'id al-ushuliyah*) dan fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*), dan dengan cara mencari keselarasan dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Semua upaya ijtihad berorientasi pada kemaslahatan, sesuai kaidah "meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan".

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan survei buku dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan terdiri dai: (1) sumber primer, yaitu karta tulis Ibn Taimiyah; (2) sumber sekunder, yaitu buku dan tulisan tentang biografi dan pemikiran Ibn Taimiyah, serta buku ushul fiqh.

Dari data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa: (1) tujuan negara adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik pada aspek spiritual keagamaan maupun sosial ekonomi. Tujuan tersebut dapat dicapai bila kekuasaan politik mampu mewujudkan tugas utama amar ma'ruf nahyi munkar. Penjabaran tugas utama ini pada berbagai bidang kehidupan negara berpijak pada prinsip bahwa keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*) merupakan sendi *al-ma'ruf*, sedangkan kezaliman dan kemadlaratan merupakan sendi *al-munkar*; (2) landasan pemikiran politik Ibn Taimiyah secara normatif berpijak pada al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, serta menggunakan beberapa metode istimbath dan kaidah fiqhiyyah. Secara sosiologis, berpihak pada asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial (*al-insan madaniyun bi al-thab'i*) perlu mengorganisasikan berbagai kepentingan mereka melalui adanya otoritas kekuasaan politik; (3) beberapa aspek dalam pemikiran Ibn Taimiyah memiliki relevansi dengan *maqashid syari'ah*, baik tercapai dari segi adanya (*min janib al-'ada'*) yaitu menetapkan kebijakan yang berorientasi pada terwujudnya pemeliharaan atas agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, dan kepentingan masyarakat. Juga dari segi tidak adanya (*min janib al-'adam*) dalam bentuk upaya preventif dan repressif oleh kekuasaan politik terhadap kondisi yang mengancam aspek pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, dan masyarakat.